

# KOORDINASI CAMAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KECAMATAN REGOL

## *CIRCULAR COORDINATION IN DEVELOPING CREATIVE ECONOMY IN DISTRICT REGOL*

**Adi Sujono Simanulang<sup>1</sup>, Diani Indah<sup>2</sup>**

1,2Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

<sup>2</sup>indahdiani7160@gmail.com

---

### **ABSTRAK**

Masalah dalam penelitian ini adalah tentang Koordinasi camat dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif studi di Kecamatan Regol di Kota Bandung. Penelitian ini berbicara dan berfokus kepada koordinasi yang dilakukan oleh camat dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang dimana ekonomi kreatif menjadi salah satu fokus utama dalam ekonomi kota Bandung khususnya di kecamatan Regol yang dimana kecamatan Regol memiliki banyak sumber potensi ekonomi kreatif seperti kuliner, seni, arsitek dsb. Berdasarkan observasi pertama, peneliti menemukan beberapa indikasi permasalahan yang terjadi dalam koordinasi pengembangan ekonomi kreatif di Regol seperti elemen pembahasan ekonomi kreatif, adanya miskomunikasi dalam koordinasi, dan cukup banyak para pelaku ekonomi kreatif yang tidak bertahan lama atau gulung tikar. Peneliti mencoba meneliti dengan menetapkan rumusan masalah seperti, Bagaimana Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan, Faktor apa saja yang menjadi penghambat, Dan upaya apa saja yang sudah dilakukan dari koordinasi pengembangan Ekonomi kreatif.

Untuk menganalisis masalah yang telah peneliti jelaskan, maka peneliti memilih pendekatan teori menurut G.R Terry dengan dimensi sinkronisasi, pengaturan waktu, harmonisasi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam koordinasi. Berdasarkan teori yang telah peneliti tetapkan maka penelitian ini memiliki proposisi sebagai berikut “Agar koordinasi pengembangan ekonomi kreatif kecamatan Regol berjalan baik dan optimal, maka koordinasi harus dilakukan berdasarkan dimensi Sinkronisasi, pengaturan waktu, harmonisasi dan tujuan yang ditetapkan.

Metode penelitian yang peneliti tetapkan adalah metode deskriptif, yang bersumber pada data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan Analisis data Miles dan Huberman serta pengujian data menggunakan Triangulasi data.

Penelitian dalam skripsi ini mengindikasikan bahwa koordinasi camat dalam pengembangan ekonomi kreatif di kecamatan Regol akan berjalan baik dan berlangsung optimal jika dimensi sinkronisasi, pengaturan waktu, harmonisasi, penetapan tujuan dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Regol.

**Kata kunci:** Koordinasi camat, ekonomi kreatif, sinkronisasi

### **ABSTRACT**

*The problem in this research is about district head's coordination within creative economy development in Regol Districts Bandung City. This research talk and had a focus*

*about the Coordination by the Districts Government head in Regol to develop the creative economy who the one of most focus sector's of economy to develop in Bandung specially in Regol who have a lot of resourches about creative economy such a culiner, art, arsitect and many other. From the first observation about the focus, researchers found many problem indication abpu the coordination such as element of discussion about creative economy, there are miscommunication and lot of perpetrators creative economy has bankrupt. And researchers try to know about that with making an identification of problem such as how the coordination creative of economy that the Government districts do, What thing the inhibitors of the development creative economy from the cordination, and what the Districts government had done to develop the creative economy by thecoordination.*

*To analyze the problem that the researcher explain, researchers uses G.R Terry Theory approach with four dimention such as synchronization, time setting, harmonization, and the goals who set before,*

*Based on the theoretical supervision approach, researchers formulated the proposition: "to make the coordination of creative economy development going optimal, the coordination that the regol's districts goverment do must be do according to the Synchronization, Time setting, Harmonization, and Goals who has set.*

*The method uses in this researches is descrptive method, as well as sources and theqniques of data collection using primarry and secondary data sources, and collected trough the observation, interviews adn documentation. Data analysis theqnique used Miles and Huberman , and the theqnique validity data researchers used triangulation data.*

*The research of this study indicate that in the coordination of creative economy development by the Regol's Districts Head Goverment is more optimal and runs well if the dimension such as syncronization, time setting, harmonization, goals who set up do well by the Districts Government.*

**Keywords:** *Sub-district coordination, creative economy, synchronization*

## 1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan jaman dari masa ke masa perubahan terhadap sektor ekonomi di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan dan peningkatan, dari masa berbuburu dan bercocok tanam atau ekonomi agraris, ekonomi industri baik home industri ataupun industri besar, teknologi hingga muncul sektor ekonomi yang paling baru dan cukup eksis kehadirannya di Indonesia, yaitu Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif yang dimaksud adalah suatu konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama dalam

segala bentuk usahanya. Di negara maju hal ini mungkin sudah lama ada dan sudah menjadi bagian dari aktifitas ekonomi sehari-hari negara tersebut. Berbeda dengan negara Indonesia yang masih terbilang baru mengenal ekonomi kreatif secara menyeluruh. Oleh karena itu dalam menghadapi era ekonomi baru tersebut pemerintah harus sudah siap dalam membina, memberdayakan serta harus mengembangkan masyarakat dalam memahami dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi kreatif tersebut.

Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menghadapi perkembangan ekonomi di era yang baru adalah dengan membuat Badan Ekonomi Kreatif di Indonesia yang disingkat Bekraf

yang dimana tugas dari bekrak tersebut adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam pengembangan Ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam hal ini, Bekraf telah menulis potensi-potensi di tiap daerah yang menjadi subsektor dari ekonomi kreatif yaitu : aplikasi dan pengembangan game, arsitektur dan desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen, film, animasi video, fotografi, kriya (kerajinan tangan), kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio .

Sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bandung ditengah persaingan ekonomi yang semakin ketat, walaupun kegiatan pengembangan ekonomi kretaif ini belum tertuang dalam peraturan daerah ataupun peraturan walikota secara khusus namun dalam pencapaian maksud dan tujuan dari program pengembangan ekonomi kreatif di Bandung bisa mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pada pasal 3 ayat 2 huruf c dan d yang masing-masing berisi menumbuhkan dan meningkatkan UMKM menjadi usaha yang berdaya saing tinggi dan dapat mengembangkan usahanya. Sehingga mampu beradaptasi dalam sektor ekonomi kreatif yang ada di Bandung.

Untuk mewujudkan program ekonomi kreatif tersebut Pemerintah Kota Bandung melalui kerjasama yang terbuka dan menerapkan asas desentralisasi ketingkat Camat, Kelurahan dan bahkan Rt/Rw. Hal ini juga tertuang dan menjadi landasan pelaksanaan ekonomi kreatif di tiap Wilayah Kota Bandung yang tercantum dalam Bab III, pasal 5 Perda Kota Bandung tentang UMKM, yaitu

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam mengelola UMKM. Hal ini mempertegas bahwa Pemerintah Kota Bandung harus serius dalam menghadapi kegiatan perekonomiannya di wilayah tersebut.. Oleh karena itu dalam tugas pengembangan ekonomi kreatif yang harus dilakukan oleh camat haruslah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas atau instansi terkait ekonomi kreatif di Koa Bandung seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkeduduakn sebagai kedinasan yang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan Perwal 1938 tahun 2016 serta pelaku kegiatan ekonomi kreatif di Kecamatan Regol tersebut. Agar segala tujuan Pemetintah Daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif di Daerah bisa terlaksana dengan baik dan membawa hasil yang positif bagi kemajuan dan kemakmuran masyarakat di daerah.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, terdapat beberapa masalah dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif di kecamatan Regol seperti :

- a) Modal usaha pelaku ekonomi kreatif yang tidak sanggup menyokong kegiatan produksi ekonomi kreatif yang dilakukan.
- b) Peran Pemerintah dalam pelatihan dan penyeluhan Pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Pemeirntah Kecamatan Regol belum maksimal.
- c) Produk ekonomi kreatif yang belum terekspos keluar, dikarenakan Pameran atau Festival produk Ekonomi Kreatif yang jarang dilakukan dan hanya di ikuti oleh sebagian pelaku ekonomi kreatif yang terdata di Kecamatan.

- d) Antusiasme Masyarakat menjadi pelaku ekonomi kreatif masih kurang karena Kegiatan Ekonomi kreatif belum menjadi sektor utama dalam perekonomian.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah koordinasi yang dilakukan oleh camat dalam pengembangan ekonomi kreatif di kecamatan Regol
2. Faktor penghambat dalam pengembangan ekonomi kreatif di kecamatan Regol
3. Usaha yang dilakukan pemerintah Kecamatan Regol dalam mengembangkan ekonomi kreatif

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Koordinasi

Menurut G.R. Terry (2010:187) *Coordination is the orderly synchronization of effort to private the paper amount, timing, and directing of execution resulting in harmonious and unified action to stated objective.* Maksudnya koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu yang dipimpin dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan.

Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi (coordination) sebagai proses pengintegrasian tujuan-

tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Pendapat yang sama disampaikan Handoko (2003:196) kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Hal ini juga ditegaskan oleh Handyaningrat (1985:88) bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handyaningrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (leadership) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi.

Menurut G.R. Terry (2010:187) *Coordination is the orderly synchronization of effort to private the paper amount, timing, and directing of execution resulting in harmonious and unified action to stated objective.* Maksudnya koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu yang dipimpin dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Dan dari pengertian dan tujuan yang telah dikemukakan diatas Koordiansi pemerintahan menurut G.R Terry dalam pelaksanaannya memiliki variabel sebagai berikut :

1. Usaha sinkronisasi yang teratur  
Koordinasi merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk

menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi menjadi penting dalam pelaksanaan suatu program untuk menghindari ketiadaan pekerjaan atau terjadinya duplikasi pekerjaan.

2. Pengaturan waktu yang dipimpin Pengaturan waktu menunjukkan penentuan waktu dan perkiraan masa pengerjaan dari keseluruhan kegiatan. Sedangkan dipimpin (directing) yaitu kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha bimbingan, memberikan arahan, saran-saran, perintah-perintah, instruksi-instruksi agar tujuan yang telah ditentukan semula dapat dicapai.
3. Harmonis Harmonis adalah adanya saling pengertian dan penyesuaian antara kedua belah pihak, satu sama lain saling memberikan keuntungan dan merasa senang.
4. Tujuan yang ditetapkan Menurut Terry dalam. Hasibuan (2011:17) tujuan adalah hasil yang diinginkan yang melukiskan skop yang jelas, serta memberikan arah kepada usaha-usaha seorang pemerintah. Tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan dalam suatu rencana (plan), karena itu hendaknya tujuan ditetapkan jelas, realistis dan cukup menantang untuk diperjuangkan berdasarkan pada potensi yang dimiliki. Peneliti menilai Dimensi-dimensi yang ada dalam teori G.R Terry mampu menjadi suatu alat dalam melakukan pendekatan terhadap

masalah yang ada dalam fokus penelitian.

## 2.2 Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif didasarkan pada fungsi ,peran,dan kontribusi ekonmi kreatif terhadap aspek kehidupan masyarakat,bangsa dan negara.Menurut.Departmen Perdagangan RI (2008:24),ada enam alasan mengapa ekonomi kreatif perlu dikembangkan yaitu sebagai berikut :

1. Ekonomi kreatif berkontribusi terhadap:
  - a. Pendapatan Domestik Bruto (PDB);
  - b. Menciptakan Lapangan pekerjaan
  - c. Peningkatan Ekspor
2. Ekonomi kreatif berdampak sosial,yaitu dapat meningkatkan;
  - a. Kualitas hidup;
  - b. Peningkatan toleransi sosial
3. Ekonomi kreatif mendorong inovasi dan kreativitas,yaitu dapat merangsang
  - a. Ide dan gagasan
  - b. Penciptaan nilai
4. Dengan Ekonomi kreatif,sumber daya terbarukan,yaitu
  - a. Berbasis pengetahuan,kreativitas
  - b. *Green community*
5. Ekonomi kreatif dapat menciptakan iklim bisnis,disebabkan;
  - a. Dapat menciptakan lapangan usaha
  - b. Berdampak bagi sektor lain
  - c. Dapat memperluas jaringan permasalahan

6. Dengan Ekonomi kreatif dapat meningkatkan citra dan identitas bangsa, yaitu melalui cara;
  - a. Meningkatkan turisme
  - b. Mengembangkan ikon nasional
  - c. Membangun budaya, warisan budaya
  - d. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai lokal

Dengan dilakukannya pengembangan Ekonomi kreatif banyak manfaat yang akan diperoleh oleh suatu Negara baik secara nasional dan daerah seperti penggalian terhadap potensi-potensi lokal dan pemberian manfaat nonekonomi lain, seperti pemeliharaan dan pengembangan nilai budaya serta warisan budaya, peningkatan kualitas hidup dan toleransi sosial, peningkatan kepariwisataan sumber daya terbaharukan serta peningkatan terhadap citra dan identitas bangsa.

### 3. METODE PENELITIAN

Peneliti memilih metode kualitatif karena peneliti mengutamakan kualitas analisis yang bersifat mendalam dan bukan data-data yang bersifat statistik. Sumber data dalam penelitian kualitatif itu dibagi dalam dua jenis sumber, yaitu : Data primer dan Data sekunder. Tehnik yang dilakukan dalam penentuan informan penelitian yaitu *Snowballing sampling* (digunakan apabila peneliti tak tahu siapa yang memahami informasi objek penelitian) dan *Key person* (digunakan apabila peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian) Sedangkan teknik pengumpulan data melalui Wawancara mendalam, dan Observasi. Teknis Analisis Data melalui Reduksi

Data, Penyajian Data dan Kesimpulan atau verifikasi

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis bagaimana koordinasi pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan di kecamatan Regol peneliti merujuk kepada dimensi-dimensi teori koordinasi G.R Terry yaitu sinkronisasi yang teratur, waktu yang dipimpin, harmonis, tujuan yang telah ditetapkan.

### 1. Sinkronisasi teratur

Sinkronisasi yang dilakukan itu dengan membuat agenda per rapat koordinasi. setiap satu bulan sekali, dan setiap satu bulan itu pak camat melakukan kunjungan kekelurahan untuk memantau data, dan sinkronisasi koordinasi merujuk pada data tersebut dan hasil-hasil evaluasi agar pembahasan tetap dalam koridor dan kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif. Caranya adalah kita melakukan agenda pembahasan sebelum koordinasi, jadi pembahasan yang sebelumnya tetap akan dibahas sebagai bahan evaluasi agar data dan lapangan yang kemarin bisa berkesinambungan dengan yang akan dikoordinasikan lagi.

### 2. Waktu yang dipimpin

Pengaturan waktu yang dilakukan agar selalu dipimpin sehingga pengembangan ekonomi kreatif bisa berjalan baik dalam koordinasi yaitu dengan terlebih dahulu membuat penyesuaian

waktu antara pihak kecamatan dengan kedinasan jika koordinasinya dilakukan secara vertikal, kita membuat jadwal setiap bulan atau dua bulan sekali terkait ekonomi kreatif, sehingga koordinasi ekonomi kreatif sudah terjadwal (jadwal setiap bulanan). Kalau koordinasi vertikal itu biasanya camat atau bisa melalui Kasi. Ekbang juga sudah membuat jadwal kekelurahan setiap bulan mengenai ekonomi kreatif, jadi pada intinya kita sudah ada jadwal. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pengaturan waktu yang dilakukan terhadap koordinasi pengembangan ekonomi kreatif di kecamatan regol dilakukan setelah data, pemetaan dan persiapan pembahasan seperti elemen-elemen ekonomi kreatif (data pelaku ekonomi kreatif, jenis produk) lalu dilakukan penentuan jadwal atau scheduling yang memang sudah menjadi jadwal minimal satu kali dalam 1-2 bulan mengenai ekonomi kreatif, namun ada juga koordinasi yang bersifat dadakan diluar jadwal yang sudah ditetapkan pihak kecamatan, tergantung kebutuhan yang berkaitan dengan sektor ekonomi kreatif tersebut.

### 3. Harmonis

Sebelum tiap mengadakan koordinasi ada briefing dulu melalui media sosial seperti *whatsapp*, briefing yang dilakuakn itu terkait pembahsan atau bahan “mentah” mengenai ekonomi kreatif, jadi begitu ketemu koordinasi langsung berjalan

dengan baik, diluar itu juga selalu melakukan komunikasi dengan baik. Pihak kecamatan sendiri, upaya harmonisasi dilakuan dengan menjaga Komunikasi dan satu lagi dengan sering bermusyawarah sehingga camat sebagai koordinator bisa menciptakan harmonisasi dalam koordinasi.

### 4. Tujuan Yang Ditetapkan

Tujuan dari koordinasi yang dilakukan adalah agar berkembangnya ekonomi kreatif di kecamatan Regol secara umum yaitu untuk merealisasi tuntutan Peraturan terkait pengembangan ekonomi kreatif, walaupun secara speisfik belum ada aturan yang mengikat namun ada Perda tentang UMKM di Bandung yang kita ketahui bersama pelaku sektor ekonomi kreatif juga *basicnya* ada di UMKM dan serta sasarannya ialah untuk meningkatkan perekonomian Regol, dan menargetkan pelaku wirasusaha ekonomi kreatif yang baru bisa meningkat juga mensejahterahkan masyarakat, seperti naiknya pendapatan, dan bahkan diharapkan bisa membuka lapangan kerja baru sehingga berkurang pengangguran, dan yang kedua dalam internal pemerintah itu sendiri sasaran koordinasi pengembangan ekonomi kreatif adalah terciptanya kesepahaman kerja, sehingga koordinasi yang berlanjut bisa berjalan dengan baik lagi. Dan cara untuk memperoleh kesepahaman itu adalah harus banyak musyawarah, dan musyawarah dilakukan biasanya ditingkat kecamatan terlebih dahulu seperti mengundang Rt, Rw, Kelurahan Para dan pelaku ekonomi kreatif Regol yang telah terdaftar.

Faktor penghambat dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kecamatan Regol Kota Bandung adalah ada pelaku usaha ekonomi kreatif yang tidak mau bekerjasama dengan pihak kecamatan, juga komunikasi dengan masyarakat susah, ada masyarakat yang tidak mau dicampuri oleh pihak kecamatan.

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 SIMPULAN**

Dalam mewujudkan dan melakukan pengembangan ekonomi kreatif yang ada di kecamatan Regol maka koordinasi pengembangan dilakukan oleh pihak kecamatan selaku koordinator pemerintah ditingkat kewilayahan dan juga dengan Dinas kebudayaan dan pariwisata kota Bandung yang memiliki tugas dan kewenangan terhadap sektor ekonomi kreatif dan melibatkan beberapa pelaku ekonomi kreatif. Mekanisme koordinasi yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data ekonomi kreatif terlebih dahulu baik yang diperoleh dari pelaku yang mendaftarkan diri dan pendataan yang dilakukan oleh kecamatan melalui Rt/Rw dan menetapkan rencana dan tujuan seperti menentukan konsep kegiatan pengembangan (Festival, pelatihan, penataan/mengintegrasikan) dan melakukan pertemuan, rapat, perbincangan yang disebut sebagai koordinasi.

Koordinasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan, dinas terkait serta masyarakat dan lebih khusus para pelaku ekonomi kreatif, peneliti menganalisis secara empirik melalui teori koordinasi yang dikemukakan oleh George. R. Terry, hal-hal ini mengupayakan adanya suatu

kesatuan tindakan dari unit yang berkoordinasi sehingga kegiatan pengembangan ekonomi kreatif di kecamatan Regol dapat berjalan dengan baik, maka Camat sebagai koordinator kewilayahan harus melakukan koordinasi dengan dimensi sebagai berikut,

#### **1. Sinkronisasi Teratur**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait hal ini, menemukan bahwa Camat (pihak kecamatan) memiliki sinergitas dalam hal sinkronisasi dengan Dinas kebudayaan dan Pariwisata, yang memunculkan bahwa sinkronisasi yang dilakukan adalah sama yaitu dengan membuat agenda, pemberitahuan, dan komunikasi sehingga apa yang menjadi pembahasan terkait event pengembangan ekonomi kreatif bisa saling berkaitan..

#### **2. Waktu terpimpin**

Berdasarkan hasil penelitian pengaturan waktu terpimpin yang dilakukan oleh pihak kecamatan yang saling berkoordinasi dengan pihak Dinas kebudayaan dan pariwisata menemukan sinergitas waktu terpimpin yang dimana pengaturan waktu terpimpin dilakukan dengan menetapkan jadwal koordinasi walaupun secara spesifik ada hal yang menjadi pembeda antara kedua instansi yaitu pihak kecamatan telah menetapkan jadwal koordinasi terkait pengembangan ekonomi kreatif di kewilayahan sedangkan dari pihak disbudpar lebih condong ke event yang akan berlangsung atau waktu koordinasi

tergantung event yang akan dibuat..

### 3. Harmonis

G.R Terry mengemukakan harmonis adalah adanya saling pengertian dan penyesuaian antara kedua belah pihak, satu sama lain. Peneliti menemukan bahwa harmonisasi yang dilakukan oleh kecamatan dengan dinas kebudayaan dan pariwisata serta pelaku ekonomi kreatif masih menemukan ketimpangan antara keinginan pelaku ekonomi kreatif dan apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah

### 4. Tujuan yang ditetapkan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa tujuan yang ditetapkan dari koordinasi pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan dengan pihak kedinasan yaitu adalah untuk mewujudkan *Blue print* pengembangan ekonomi kreatif yang di rilis oleh Departemen Perdagangan RI (2008:2004).

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan dimensi lain yang turut mempengaruhi koordinasi pengembangan ekonomi kreatif di kecamatan Regol yaitu dimensi kolaborasi atau kerjasama, sehingga dalam koordinasi pengembangan ekonomi kreatif di kecamatan Regol yang dilakukan oleh Camat sebagai koordinator kewilayahan dan Disbudpar sebagai instansi pemerintah yang berwenang dalam ekonomi kreatif harus berkolaborasi dengan :

1. BPS Kota Bandung.
2. Pihak Akademik.

3. Dunia usaha pihak swasta.

4. Media.

5. Para pelaku ekonomi kreatif.

Faktor penghambat yang menjadi kendala dalam koordinasi pengembangan ekonomi kreatif di kecamatan Regol adalah Miskomunikasi atau kesalahpahaman saat koordinasi, Apatisme masyarakat, Elemen pembahasan mengenai Permodalan adanya kepentingan pihak lain dan Sinkronisasi terhadap kebutuhan pelaku ekonomi kreatif

Upaya yang telah dilakukan dari hasil koordinasi pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan pihak Kecamatan Regol sebagai adalah pelatihan kewirausahaan, mengadakan event bazar dan pentan (penyatuan subsektor ekonomi kreatif).

## 5.2 Saran

### 5.2.1 Saran Akademis

Untuk meningkatkan kegunaan ilmu pengetahuan, diharapkan kepada peneliti berikutnya melakukan kajian lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan teori atau konsep lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, sehingga bisa memberikan kontribusi yang baik bagi kajian Ilmu pemerintahan khususnya manajemen pemerintahan.

### 5.2.2 Saran Praktis

1. Pemerintah Kecamatan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus melakukan Sinkronisasi teratur terlebih dalam melakukan pendataan,.
2. Pengaturan waktu terpimpin antara Kecamatan Regol dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Koa Bandung harus diselaraskan,.

3. Upaya harmonisasi antara pihak pemerintah kecamatan dan kedinasan harus dilakuakn juga terhadap para pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat agar sinergitas dalam koordinasi pengembangan ekonomi kretaif berjalan dengan baik..
4. Tujuan yang ditetapkan dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di kecamatan Regol harus sesuai antara yang berkoordinasi dan melibatkan bidang lain seperti akademik, media, masyarkat pelaku ekonomi kreatif.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Bungin,Burhan 2009. *Penelitian Kualitatif*, Kencana:Jakarta
- Creswell W,John.2016. *Research design,pendekatan metode kualitatif,kuantitatif dan caqmpuran*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ndraha,Taliziduhu.2011. *Kybernology,Ilmu pemerintahan baru*, Jakarta : Rineka cipta

- Purnomo,A Rochmat 2016. *Ekonomi Kreatif :Pilar pembangunan Indonesia*, Ziyad :Surakarta
- Sobandi,Baban dkk.2006. *Desentralisasi dan tuntutan penataan kelembagaan Daerah*, Bandung : Humaniora
- Sugandha,Dann.1991. *Koordinasi,Alat pemersatu gerak administrasi*, Jakarta : Intermedia
- Suryana.2012. *Ekonomi kreatif,Ekonomi baru :Mengubah Ide dan menciptakan peluang*, Bandung : Salemba Empat
- Syafie Inu,Kencana.2010.*Etika Pemerintahan*, Jakarta : Rineka cipta
- Syafrudin,Ateng.1976. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Bandung : Tarsito
- Wasistiono,Sadu dkk.2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari masa ke masa*, Bandung : Fokus media

##### Dokumen dan Sumber Lain :

- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Mikro,Kecil,Dan Menengah